

**FUNGSI JEMBATAN TIMBANG DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM SISTEM LALU LINTAS ANGKUTAN
JALAN UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN
BERMOTOR MAMBANG MUDA**

SKRIPSI

OLEH :

**TINGGOMAN
NPM : 10 851 0078**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**FUNGSI JEMBATAN TIMBANG DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM SISTEM LALU LINTAS ANGKUTAN
JALAN UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN
BERMOTOR MAMBANG MUDA**

Nama : TINGGOMAN
NPM : 10 851 0078
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

**MENYETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

Pembimbing I



Dr. Abdul Kadir, M.Si

Pembimbing II



Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd



DEKAN

Dr. Abdul Kadir, M.Si

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

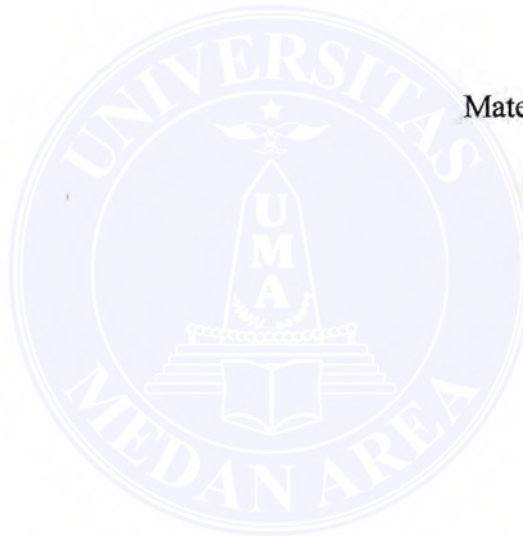
Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Mei 2014

Materai



TINGGOMAN
NIM : 108510078



**FUNGSI JEMBATAN TIMBANG DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM SISTEM LALU LINTAS ANGKUTAN
JALAN UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN
BERMOTOR MAMBANG MUDA**

**TINGGOMAN
NPM. 100510078**

ABSTRAK

Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah merupakan unit pengawasan terhadap prasarana jalan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, unit ini sangat strategis peran dan kedudukannya dalam menjaga kondisi jalan agar tetap dalam kondisi yang mantap guna menunjang aktifitas sosial dan daerah.

Untuk mewujudkan hal ini perlu dukungan semua pihak khususnya pengusaha angkutan barang agar mematuhi Peraturan Perundang-Undangan karena sampai saat ini masih banyak dijumpai pelanggaran tentang membawa lebih muatan terhadap dimensi kendaraan, pelanggaran terhadap tata cara pemuatan barang, maka dengan demikian DISHUBSU tetap mengoptimalkan fungsi Jembatan Timbang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dalam sistem lalu lintas angkutan jalan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor Mambang Muda telah berupaya agar kondisi prasarana jalan terlindungi, dan arus lalu lintas Angkutan Barang dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib.

Pengawasan yang dilakukan di UPPKB Mambang Muda, berdasarkan undang – undang RI. No. 22 thn 2009 tentang lalu lintas Angkutan jalan.

Peraturan Pemerintah No. 43 thn 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan, Keputusan Menteri Perhubungan No. Km. 5 thn 1995 tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan melalui peraturan dan perundang – undangan diharapkan dapat berjalan baik.

Skripsi ini merupakan deskriptif yakni jenis penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai keadaan yang di dapatkan pada waktu penelitian dilakukan di UPPKB Mambang Muda. Tujuan penelitian ingin melihat secara langsung apa fungsi Jembatan Timbang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dalam sistem lalu lintas Angkutan jala di UPPKB Mambang Muda.

Metode yang digunakan adalah diskriptif dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa pelaksanaan fungsi jembatan timbang Dinas Perhubungan Sumatera Utara dalam sistem lalu lintas angkutan jalan UPPKB Mambang Muda telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan walaupun masih terdapat kejanggalan pada indikator hasil penimbangan, dan jalan keluar masuk jembatan timbang dalam keadaan kondisi yang rusak, dan flatform (lantai) jembatan timbang perlu perbaikan.

Kata Kunci : UPPKB, Jembatan Timbang, Pengawasan

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini Penulis mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **“Fungsi Jembatan Timbang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Dalam Sistem Lalu Lintas Angkutan Jalan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Mambang Muda”**.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si, Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I.
- Bapak Rudi Salam Sinaga, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
- Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi, MPd, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara beserta staf dimana penulis melakukan penelitian.

- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima – kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda bagi keduanya bakti dan doa penulis.

Demikianlah dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2014

Penulis



Tinggoman
NPM : 10 851 0078



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
RIYAWAT HIDUP	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Pembatasan Masalah	4
1.4. Perumusan Masalah.....	5
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. LANDASAN TEORI.....	6
1.1. Uraian Teori	6
1.1.1. Pengertian Lalu Lintas.....	6
1.1.2. Sistem Jaringan dan Klasifikasi Jalan	7
1.1.3. Pengertian Jembatan Timbang	10
1.1.4. Fungsi Jembatan Timbang.....	15
1.2. Kerangka Pemikiran.....	17
BAB III. METODE PENELITIAN	20
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
3.2. Informan Penelitian.....	20
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.4. Analisis Data	23
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
4.1. Penelitian	26



4.1.1.	Gambaran Umum UPT PPSP LLAJ Wil. III Rantau Prapat UPPKB Mambang Muda Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.....	26
4.1.2.	Komunikasi dan Koordinasi.....	30
4.1.3.	Struktur organisasi dan uraian tugas.....	34
4.1.4.	Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas UPT Pengawas dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	35
4.2.	Pembahasan.....	43
4.2.1.	Tata cara pelaksanaan penimbangan mobil angkutan barang.....	43
4.2.2.	Teknis pengoprasian jembatan timbang yang diperbolehkan serta toleransi ukuran.....	44
4.2.3.	Pengawasan muatan lebih belum efektif dan jalan keluarnya.....	45
4.3.	Analisa.....	46
4.3.1.	Sistem lalu lintas angkutan jalan terhadap UPPKB.....	46
4.3.2.	Apakah UPPKB sudah standar sesuai dengan undang-undang.....	46
4.3.3.	Apakah UPPKB di Sumatera Utara telah berjalan efektif dalam sistem lalu lintas angkutan jalan.....	47
4.3.4.	Struktur Organisasi (UPPKB) Mambang Muda.....	70
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	71
4.1.	Simpulan.....	71
4.2.	Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1	Klasifikasi Menurut Kelas Jalan..... 9
Tabel 2	Jumlah personil minimal dan jadwal penugasan petugas UPPKB 1 Platform dan 1 arah..... 63
Tabel 3	Waktu Penugasan Personil Shift..... 63
Tabel 4	Hasil Kegiatan Penimbangan Kendaraan Bermotor Pada UPPKB Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Minggu IV Januari Tahun 2014 64
Tabel 5	Hasil Kegiatan Penimbangan Kendaraan Bermotor Pada UPPKB Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Bulan Februari Tahun 2014 65
Tabel 6	Hasil Penelitian Di UPPKB Mambang Muda Pada Bulan Januari s/d Februari Tujuan R. Prapat – Medan Bahan Pangan Strategis Dan Sembako Bulan Januari 2014 66
Tabel 7	Hasil Penelitian Di UPPKB Mambang Muda Pada Bulan Januari s/d Februari Tujuan Medan – R. Prapat Bahan Pangan Strategis Dan Sembako Bulan Januari 2014 67
Tabel 8	Hasil Penelitian Di UPPKB Mambang Muda Pada Bulan Januari s/d Februari Tujuan R. Prapat – Medan Bahan Pangan Strategis Dan Sembako Bulan Februari 2014 68
Tabel 9	Hasil Penelitian Di UPPKB Mambang Muda Pada Bulan Januari s/d Februari Tujuan Medan – R. Prapat Bahan Pangan Strategis Dan Sembako Bulan Februari 2014 69

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian	19
Gambar 2 Struktur Organisasi UPPKB Mambang Muda.....	70



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Penelitian dari Universitas Medan Area.
- Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian di Dinas Perhubungan UPT PPSP LLAJ Wilayah III Rantau Prapat UPPKB Mambang Muda.
- Lampiran 3 Gambar Jalan Pintu Keluar Masuk Jembatan Timbang UPPKB Mambang Muda.
- Lampiran 4 Gambar Gedung UPPKB Mambang Muda.
- Lampiran 5 Gambar Gedung Penyimpanan Barang UPPKB Mambang Muda.
- Lampiran 6 Gambar Gedung Generator Set UPPKB Mambang Muda.
- Lampiran 7 Gambar Lapangan Penumpukan Barang UPPKB Mambang Muda.
- Lampiran 8 Gambar Lapangan Parkir UPPKB Mambang Muda.
- Lampiran 9 Gambar Kegiatan Pengukuran Dimensi Kendaraan di UPPKB Mambang Muda.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Di samping itu, dalam melakukan pembinaan lalu lintas jalan juga harus diperhatikan aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, kelestarian lingkungan, tata ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan internasional serta koordinasi antar wewenang pembinaan lalu lintas jalan di tingkat pusat dan daerah serta antar instansi, sektor dan unsur terkait lainnya.

Kebijakan perencanaan sistem transportasi, khususnya Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan oleh Jembatan Timbang, keberadaannya tidak dapat dipisahkan hubungan integral antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, dimana penyelenggaraan infrastruktur transportasi merupakan kebutuhan turunan (derived demand) yang mempunyai sifat terus menerus serta mempunyai ciri tidak mengenal

batas wilayah administrasi, sehingga tidak bisa dipenggal atas dasar kewilayahan saja.

Sektor transportasi juga merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana prasarana yang didukung oleh manajemen tata laksana Sumber Daya Manusia (human resources) yang memadai dan tepat guna, dalam menciptakan suatu jaringan mutu pelayanan yang berdaya guna dan berhasil guna, melalui penguatan legalitas operasional yang didasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, menuju terselenggaranya good governance sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.

Sejalan perkembangan dinamika sektor transportasi, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, khususnya dalam Pasal 169 tentang pengaturan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan angkutan barang telah diberlakukan ketentuan muatan angkutan barang sesuai berat muatan yang diijinkan dan dikenakan tindak pelanggaran (tilang) bagi kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan (tonase), Peraturan Pemerintah no. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, pengganti PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan, disamping itu juga telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 14 Tahun 2007 tentang Denda Kelebihan Muatan dapat dijadikan sebagai landasan operasional dalam memfasilitasi pelayanan publik yang harus tetap berjalan dan terlayani, dengan penerapan Standart Operasioal Prosedur nya sebagai payung hukum penyelenggaraan fungsi pengawasan

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Bina Marga, 2007, *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKID)*, Jakarta: DPU.
- Djajoesman, A.L. 2006, *Manajemen Lalu Lintas Darat*, Jakarta: Erlangga.
- Hobbs, FD, 2005, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : DIA FISIP Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morlok, E.K., 2008, *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*, Jakarta: Erlangga, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Santoso, Idwan dkk, 2007, *Manajemen Lalu-Lintas Perkotaan*, Bandung: Badan Penerbit ITB.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Warpani, S.P., 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: Penerbit ITB.
- Zainal, Mukhlis, 2005, *Sistem Manajemen Transportasi Kota*, Jakarta: Med Print Offset., 2007, Modul Pelatihan Manajemen Lalu Lintas Perkotaan, Bandung: LPM ITB.
- Software Jembatan Timbang Semua Data Tersebut Bisa Terrecord / Tersimpan* (Santoso, 2007:88)
- Abubakar I., DKK, *Memuju Tertib Lalu Lintas*, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan, Jakarta 2005.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Aneka Jakarta, 2006.
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika Surabaya, 2007.
- Tamin, Ofyar Z. *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2000.

Dasar-Dasar Hukum Pengoperasian Jembatan Timbang

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
7. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2012 tentang Manajemen dan Rakayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.
10. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermc Dijalan.
11. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan.
12. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Dijalan.
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 14 Tahun 2007 tentang Denda Kelebihan Muatan.
16. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK. 1493/AJ.108/DRJD/2013.
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 1 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
19. Buku Panduan Peserta Diklat Operator Jembatan Timbang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JALAN KOLAM NOMOR 1 MEDAN ESTATE TELEPON : 061 - 7366878, 7364348, FAX. 7366998, MEDAN - 20233

Nomor : 256 /F.5/I.2.b/20014

04 Pebruari 2014

Lamp : -

T a i l : Pengambilan Data

Kepada : Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Sumatera Utara
Di -
Medan

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

N a m a : Tinggoman
Nomor Pokok Mahasiswa : 10.851.0078
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data di Instansi/Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Guna penyusunan skripsi mahasiswa yang berjudul : " Fungsi Jembatan Timbang Dalam Sistem Lalu Lintas Di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak pimpin.

Demikian kami sampaikan , atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Abdul Kadir , SH , MSi



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Imam Bonjol No. 61, Telp. (061) 4510082 - 4510083, Fax. (061) 4568206
MEDAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 42314/647/KP/PHB/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **TINGGOMAN**
Nomor Pokok Mahasiswa: 10.851.0078
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Benar telah melaksanakan Pengambilan Data pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sesuai surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor : 250/F.5/I.2.b/2014 Tanggal : 04 Februari 2014, guna untuk penyusunan Skripsi Mahasiswa yang berjudul :

“ FUNGSI JEMBATAN TIMBANG DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM SISTEM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDERAAN BERMOTOR MAMBANG MUDA “,

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Medan, 17 April 2014

a.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIS

u.b,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM



NIP. 19580905 198203 1 007

Tembusan :

- Yth, Kadishubsu (sebagai laporan).
- cc.file

Lampiran 3

**Gambar Jalan Pintu Keluar Masuk Jembatan Timbang
UPPKB Mambang Muda**



Lampiran 4

Gambar Gedung UPPKB Mambang Muda



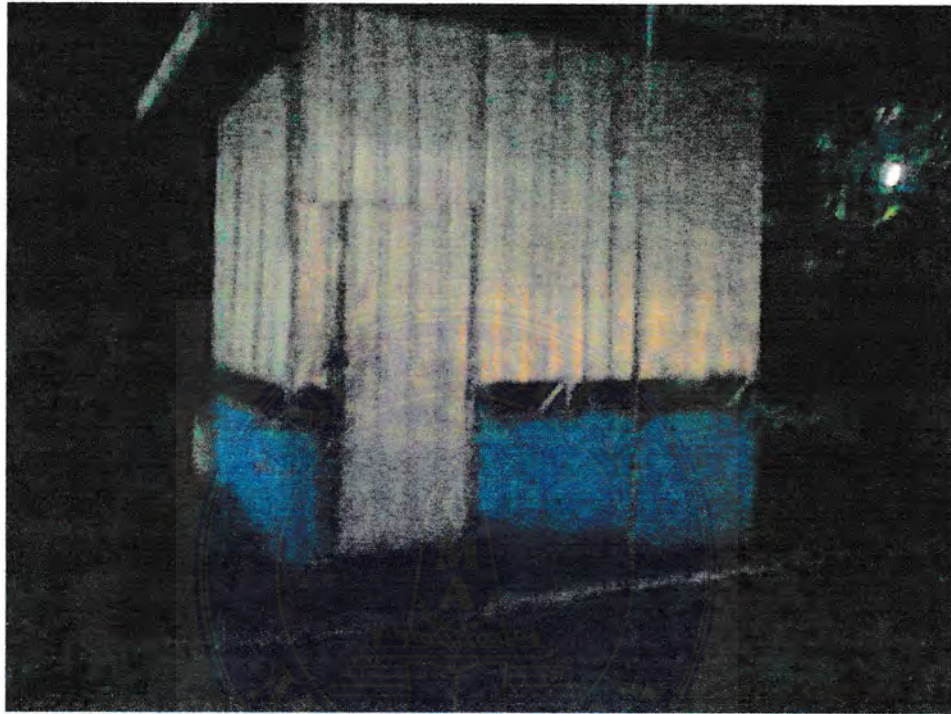
Lampiran 5

Gambar Gedung Penyimpanan Barang UPPKB Mambang Muda



Lampiran 6

Gambar Gedung Generator Set UPPKB Mambang Muda



Lampiran 7

Gambar Lapangan Penumpukan Barang UPPKB Mambang Muda



Lampiran 8

Gambar Lapangan Parkir UPPKB Mambang Muda



Lampiran 9

**Gambar Kegiatan Pengukuran Dimensi Kendaraan
di UPPKB Mambang Muda**

